

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- : 3
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juni 2020
Waktu : 10.30 s.d. 15.25 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019;
2. Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA. 2019.
3. RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021; dan
3. Isu-Isu Aktual.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 49 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI
- B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Edhy Prabowo, M.M., M.B.A. (Menteri Kelautan dan Perikanan);
 2. Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 3. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 4. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 5. Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 6. Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 7. Dr. TB. Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);

8. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan); dan
9. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan).
10. Farida Mokodompit, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Persero);
11. M. Yana Aditya, Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero);
12. Arief Haendra, Direktur Pengembangan PT Garam (Persero).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019, Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA. 2019, RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021, dan Isu-Isu Aktual, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 sebesar **Rp5.677.815.698.000,00** (Lima Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor: S-376/MK.02/2020 dan Nomor B.310/M.PPN/D.8/PP/04.02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2021, dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp494.722.807.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp87.767.955.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, sebesar Rp607.253.792.000,00 (Enam Ratus Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya**, sebesar Rp893.040.404.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah);

- e. **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp819.802.922.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp271.704.028.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**, sebesar Rp352.590.508.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah);
- h. **Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp1.579.173.626.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
- i. **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan**, sebesar Rp571.759.656.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menelaah RKA dan RKP Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebesar **Rp3.453.100.000.000,00** (Tiga Triliun Empat Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Juta Rupiah), untuk kegiatan:
 - a. Prioritas Nasional (PN) 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, sebesar Rp2.621.750.000,00 (Dua Triliun Enam Ratus Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Prioritas Nasional (PN) 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, sebesar Rp424.800.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).
 - c. Prioritas Nasional (PN) 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, sebesar Rp30.900.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
 - d. Prioritas Nasional (PN) 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, sebesar Rp275.650.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - e. Dukungan Manajemen, sebesar Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah).

3. Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 menjadi sebesar ±Rp7.000.000.000.000,00 (Tujuh Triliun Rupiah) agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan padat karya dan bantuan sosial, seperti kegiatan Gemarikan, Bakti Mutu Karantina, Bakti Nelayan, Klaster Budi Daya Udang, Bantuan Benih Ikan dan Pakan Ikan Mandiri, Kelompok Penggerak Konservasi, Pugar, Kelompok Masyarakat Pengawas, serta Pelatihan dan Pendidikan Vokasi Masyarakat dalam rangka memulihkan ekonomi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan pascapandemi COVID-19, khususnya bagi nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya ikan yang terdapat di perairan Indonesia bagian timur agar bernilai tambah dan berdaya saing tinggi, guna percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan devisa negara.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Indonesia, seperti pengawasan terhadap penyelundupan benih lobster ataupun sejenisnya yang masih berlangsung, dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan mencegah kerugian negara serta demi keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia yang lestari.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaporkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya perikanan dan melaporkan program dan kegiatan yang terkait dengan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pada Rapat Kerja yang akan datang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.25 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Dr. Edhy Prabowo, M.M., M.B.A.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151